

TAJUK RENCANA

Menindak Penyelundup Minyak Goreng

DALAM kunjungannya ke Yogyakarta, Minggu (13/3), Presiden Jokowi sempat blusukan ke Pasar Beringharjo dan Sentul. Presiden langsung mendatangi kios yang menjual minyak goreng dan membeli secukupnya dengan uang yang ada di dompet. Kunjungan mendadak ini tentu mengagetkan, bahkan lolos dari pengamatan wartawan. Kunjungan tersebut baru terungkap setelah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta mengunggah momen tersebut melalui media sosialnya (KR 14/3).

Tak ada yang tahu berapa harga minyak goreng yang dibayar Presiden Jokowi, apakah melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah atau tidak. Pedagang nampaknya juga tak peduli berapa harganya karena mereka sudah senang dikunjungi Presiden—peristiwa yang tentu mereka anggap langka. Apalagi, ketika pedagang menyerahkan uang pengembalian, Presiden menolaknya dan diberikan kepada pedagang.

Kunjungan Presiden ke Yogyakarta sebelum bertolak ke Kalimantan Timur guna mengikuti prosesi ritual Kendi Nusantara di Titik Nol Ibukota Negara (IKN), tentu punya makna penting yang tak boleh diabaikan. Presiden memahami bahwa masih ada persoalan distribusi minyak goreng di Tanah Air yang harus diselesaikan.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan ada oknum yang menimbun minyak goreng untuk kemudian menjualnya ke luar negeri dengan harga di bawah standar. Kemungkinan industri yang menjual minyak goreng ke luar negeri dalam jumlah besar. Akibatnya, minyak goreng di Tanah Air menjadi langka, dan kalaupun

ada harganya di atas HET. Padahal, stok minyak goreng yang ada di pemerintah sangat mencukupi.

Atas kondisi tersebut Mendag berjanji akan menindak mereka yang 'bermain' minyak goreng sehingga merugikan rakyat. Penindakan itu jangan hanya pada pemain kecil yang tidak signifikan, melainkan pemain besar, yakni para spekulan yang mengendalikan harga dan distribusi barang. Kita berharap Satgas Pangan yang telah dibentuk pemerintah bekerja secara efektif, bukan hanya memantau saja, tapi juga menindak.

Hemat kita, kunci penyelesaian masalah minyak goreng berada di tangan pemerintah. Apalagi Presiden memberi perhatian serius pada masalah yang satu ini, sehingga merasa perlu untuk blusukan ke pasar dan memantau langsung kondisi minyak goreng di pasaran. Semestinya ini ditindaklanjuti menteri terkait, dalam hal ini Menteri Perdagangan, untuk segera menyelesaikan persoalan minyak goreng.

Kiranya Menteri Perdagangan tak cukup hanya memaparkan persoalan, melainkan harus segera mengambil tindakan kepada mereka yang melanggar, menimbun dan menyelundupkan minyak goreng ke luar negeri sehingga menjadi langka di dalam negeri. Tentu penindakan itu harus melibatkan institusi penegak hukum, terutama kepolisian, agar mereka yang melakukan pelanggaran diproses hingga pengadilan.

Dengan keseriusan pemerintah memberantas penimbunan dan penyelundupan minyak goreng ke luar negeri kita berharap dalam pekan ini distribusi minyak goreng normal kembali dengan harga yang normal pula. □

Industri Otomotif di Saat Pandemi

MENURUT [google.com/covid19/mobility](https://www.google.com/covid19/mobility), tren mobilitas masyarakat selama pandemi Covid-19 ke tempat-tempat seperti restoran, kafe, dan pusat perbelanjaan; taman nasional, pantai umum, dan taman umum; pusat transportasi umum; dan tempat kerja, menurun masing-masing sebesar 32%, 43%, 65%, dan 21% disbanding dasar pengukuran. Kondisi ini mengakibatkan kebutuhan sarana transportasi (otomotif) selama awal pandemi Covid-19 tahun 2020 mengalami penurunan. Hal tersebut berdampak terhadap industri otomotif, baik dari sisi produksi maupun penjualan.

Industri otomotif roda dua terpujol dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah. Pada Maret 2020, penjualan sepeda motor mencapai 561.739 unit, lalu turun sangat dalam menjadi 123.782 unit pada bulan April, kemudian Mei 2020 turun menjadi 21.581 unit. Pada Juni 2020 naik menjadi 167.992 unit dan Juli naik menjadi 292.205 unit. Secara akumulatif, penjualan sepeda motor sepanjang tahun 2020 hanya terjual hingga 3,7 juta unit, lebih rendah dari total penjualan pada 2019 yang mencapai 6,48 juta unit. Berbagai upaya dilakukan oleh produsen sepeda motor, baik dari sisi pemasaran dan layanan purna jual untuk menaikkan produksi dan penjualan dengan tetap memperhatikan proses kesehatan.

Industri otomotif roda empat juga mengalami kondisi sama. Pada Januari 2020 produksi mampu mencapai 112.659 unit mobil dengan penjualan di pasar domestik 80.435 unit. Pada Mei 2020, produksi hanya 2.510 unit dengan penjualan di pasar domestik sebanyak 3.551 unit. Pada Juli 2020, produksi mencapai 24.397 unit dengan penjualan di pasar domestik 25.383 unit. Kondisi ini jauh di bawah kapasitas produksi mobil per tahun yang rata-rata mencapai 2,3 juta unit.

Berdasar dampak pandemi Covid-19 ter-

Rudy Badrudin

hadap industri otomotif pada tahun 2020, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak penjualan barang mewah (PPnBM) bagi sejumlah mobil yang memenuhi syarat. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa industri otomotif merupakan lokomotif bagi gerbong UMKM-UMKM yang mensuplai komponen-komponen terkait. Relaksasi



KR-JOKO SANTOSO

PPnBM diberikan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021 yang mengatur pemberian insentif untuk segmen \geq \$1.500 cc kategori sedan dan $4\frac{1}{2}$ dengan komponen *local purchase* paling sedikit 70 persen per Maret 2021. Melalui PMK 120/PMK.010/2021, besaran insentif diskon PPnBM Kendaraan Bermotor diperpanjang hingga Desember 2021. Penjualan Januari sampai September 2021 tercatat 600.344 unit, jauh lebih banyak daripada periode yang sama pada tahun 2020 yang hanya sebanyak 407.390 unit mobil. Potensi industri otomotif saat

Menyambut Kurikulum Merdeka

Rudy Prakanto

Mendikbudristek menyebutkan ada tiga keunggulan Kurikulum Merdeka. Pertama, lebih sederhana dan mendalam. Pembelajaran berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Kedua, lebih merdeka. Sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan siswa.

Ketiga, lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran di kurikulum ini dilaksanakan melalui kegiatan proyek yang mencakup 25-30 persen jam pelajaran per tahun. Kegiatan proyek ini akan memberi kesempatan lebih luas kepada siswa aktif mengeksplorasi isu-isu aktual untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila.

Tentu saja bagi sekolah tidaklah mudah untuk merancang, menyusun, serta akan melaksanakan Kurikulum Merdeka ini. Diperlukan pemahaman yang utuh dan menyeluruh sehingga hasilnya sesuai harapan. Adanya tiga opsi pilihan penerapan kurikulum seperti yang disampaikan oleh Mendikbudristek, di satu sisi sangat demokratis, tetapi di sisi yang lain menjadikan sekolah pada posisi dilematis.

Secara regulasi, Kemendikbudristek telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No 5/2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (SKL), dan juga Permendikbudristek No 7/2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan

ini didukung oleh 21 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan total nilai investasi telah mencapai Rp71,35 triliun yang mampu menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38 ribu orang dan lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai nilai di sektor industri tersebut. Sektor otomotif merupakan sektor yang berkontribusi cukup signifikan terhadap ekspor nasional, yaitu 4,5% bersama 9 sektor lainnya.

Kolaborasi dan sinergi antarpelaku industri otomotif dengan industri komponen dalam negeri akan meningkatkan kemandirian industri otomotif nasional. Demikian juga antarindustri otomotif dengan industri kecil dan menengah (IKM) logam, karet, plastik dan kulit sebagai pendukung industri otomotif yang berdampak terhadap UKM naik kelas.

Sinergi kebijakan juga perlu dilakukan dalam mendorong industri mobil melalui BI dengan menempuh kebijakan suku bunga rendah, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan injeksi likuiditas; OJK dengan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan; dan LPS dengan penetapan tingkat bunga penjaminan yang rendah dan pemberian relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan perbankan. □

Dr. Rudy Badrudin, M.Si., Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta, Wakil Ketua II ISEI Cabang Yogyakarta, Peneliti Senior pada PT. Sinergi Visi Utama

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Jalan Jalur Selatan Rusak

YOGYAKARTA sebagai kota pariwisata, banyak didatangi wisatawan. Baik domestic atau mancanegara, karena itu tentu memerlukan fasilitas dan sarana yang memadai untuk mendukung itu.

Saya sebagai anggota masyarakat yang tiap hari melewati jalan jalur selatan-selatan atau jalan Deandales, sungguh prihatin. Sebab jalan mulai dari wilayah Kapanewon Galur sampai Kapanewon Panjatan sangat buruk kondisinya. Jalanan berlubang disana sini. Penyebabnya jelas karena dampak dari truk yang lalu lalang yang membawa angkutan pasir yang sangat mungkin

kelebihan kapasitas berat. Sementara hujan yang airnya menggenangi jalanan sungguh berbahaya bagi pengendara yang tidak tahu.

Ingin bukti? Silakan melewati jalanan tersebut. Apalagi kalau malah hari gelap. Karena itu saya berharap kepada yang berwenang untuk memperbaiki jalanan yang buruk itu. Hal ini mengingat akan menghadapi masa hari raya lebaran Idul Fitri, dimana banyak orang mudik. Maka siapkanlah payung, sebelum hujan lebat terjadi. □

Sugiyanto, PS Kani Binmas Tepus, Pucung Kemadang Tanjungsari

Kedaulatan Rakyat
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019).
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yurida Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan.
Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio: KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani, Wakil Kepala Perwakilan: Hariyati Tata Raharja.
Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang: Jalan Lempersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.
Banjumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.
Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Iri Warsiti.
Magelang: Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Suniyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.
Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani.
Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.